

Presiden Jokowi: Prioritas Penanganan COVID-19 untuk 12 Kabupaten/Kota

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta 12 kabupaten/kota menjadi prioritas dalam penanganan COVID-19, karena daerah-daerah tersebut menghadapi kasus aktif virus corona jenis baru itu hingga menjangkiti lebih dari 1.000 orang.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10), meminta penanganan COVID-19 diprioritaskan kepada 12 kabupaten/kota tersebut selama dua pekan ke depan. "Saya juga minta dua minggu ke depan ini diprioritaskan 12 kabupaten/kota memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional," kata Presiden dalam rapat terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebanyak 12 kabupaten/kota itu, adalah Kota Ambon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur. Saat ini, kata dia, secara nasional, penanganan COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Persentase kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia per 11 Oktober 2020, kata Presiden, mencapai 76,48 persen atau lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang 75,03

persen. Tingkat kematian pasien COVID-19 di Indonesia 3,55 persen atau menurun dibandingkan dengan dua pekan lalu yang 3,77 persen.

Namun, diakui Presiden bahwa angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi daripada rata-rata dunia yang 2,88 persen. "Namun (angka kematian, red) masih lebih tinggi dari angka kematian dunia yang berada di 2,88 persen. Ini saya kira tugas besar kita di sini bagaimana rata-rata angka kematian itu bisa ditekan terus," ujar dia.

Kasus aktif COVID-19 di Indonesia juga menurun menjadi 19,97 persen dari sebelumnya 22,46 persen. Tingkat kasus aktif COVID-19 saat ini juga lebih rendah dari rata-rata kasus aktif COVID-19 dunia yang 22,1 persen. (ANTARA)



Presiden Joko Widodo

ANTARA/HO-Biro Pers Setpres

Presiden Minta Jaringan Segera Paparkan 'Roadmap' Pemberian Vaksin

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera memaparkan roadmap atau peta jalan terkait dengan pemberian vaksin virus corona jenis baru (COVID-19) pada pekan ini.

"Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan," ujar Presiden dalam arahnya saat Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10). Presiden mengatakan roadmap pemberi-

an vaksin untuk memperjelas apa yang akan dilakukan. Dalam arahnya pada ratas tersebut, Presiden juga menyampaikan data rata-rata kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang diterimanya hingga 11 Oktober 2020 menunjukkan hasil yang baik, karena lebih rendah dari rata-rata kasus aktif COVID-19 dunia.

Kepala Negara juga menyampaikan yang terpenting dilakukan adalah terus menekan kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai kedisiplinan dalam protokol kesehatan. (ANTARA)

Pemohon Verifikasi Protokol Kesehatan Tempat Usaha di Yogyakarta Naik

YOGYAKARTA

Kesadaran tempat usaha di Kota Yogyakarta, DIY, untuk memperoleh verifikasi protokol kesehatan terus meningkat seiring kenaikan permohonan verifikasi ke Dinas Pariwisata setempat.

"Sudah ada 95 permohonan yang masuk belum termasuk tambahan permohonan pada hari ini dari sejumlah restoran atau usaha jasa makanan dan minuman," kata Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Edy Sugiharto di Yogyakarta, Senin (12/10).

Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding pada 23 September dengan 57 permohonan verifikasi protokol kesehatan dan 25 di antaranya sudah memperoleh surat verifikasi.

Menurut dia, peningkatan permohonan yang cukup signifikan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa tempat usaha pariwisata di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk memperoleh verifikasi protokol kesehatan.

Para pelaku usaha, lanjut dia, dapat memanfaatkan surat verifikasi protokol ke-



ANTARA/HO-Humas Pemkot Yogyakarta

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyerahkan surat verifikasi protokol kesehatan untuk salah satu restoran di Yogyakarta.

sehatan tersebut untuk membantu meningkatkan branding tempat usaha terutama untuk meyakinkan konsumen bahwa tempat usaha tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan yang baik untuk mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19.

Dari 95 permohonan yang masuk tersebut, sebagian besar berasal dari pelaku usaha jasa akomodasi atau perhotelan yaitu 68 permohonan. Sisanya, berasal dari usaha jasa makanan dan minuman, destinasi wisata, dan usaha hiburan.

"Karena jumlah permo-

honan yang masuk cukup banyak, maka kami pun membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi. Ada beberapa permohonan yang tidak bisa sekali diajukan lalu memenuhi syarat verifikasi," katanya.

Ia menambahkan pihaknya membutuhkan bantuan dari Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta termasuk Satpol PP Kota Yogyakarta untuk terus memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar bisa mengajukan permohonan verifikasi protokol kesehatan.

Meskipun demikian, lanjut Edy, belum semua usaha

jasa pariwisata dapat mengajukan permohonan verifikasi protokol kesehatan, seperti penyelenggaraan usaha jasa hiburan dan rekreasi untuk subsektor tertentu, seperti bioskop.

"Banyak pelaku usaha bioskop yang sudah menanyakan ke kami apakah sudah bisa membuka usahanya atau belum. Untuk saat ini, belum ada kebijakan apapun untuk jenis usaha tersebut," katanya.

Edy mengatakan pembukaan usaha bioskop maupun tempat hiburan lainnya membutuhkan kebijakan penuh dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan perlu melihat dan melakukan kajian secara detail mengenai protokol kesehatan apa saja yang harus dijalankan oleh pelaku usaha sebelum membuka usahanya.

"Harus dilihat bagaimana persiapan mereka. Yang paling penting adalah bagaimana keselamatan warga dengan protokol kesehatan yang dijalankan. Apalagi, usaha bioskop ini dilakukan di ruang tertutup yang dinilai rentan terjadi penularan virus," katanya. (ANTARA)

Asita DIY Minta Pemda Perkuat Kedisiplinan Warga Terapkan Protokol Kesehatan



ANTARA/Hendra Nurdiansyah/kye/pri

Wisatawan mengunjungi obyek wisata Pinus Pengger, di Terong, Dlingo, Bantul, DIY, sebagai salah satu destinasi favorit di Kabupaten Bantul.

YOGYAKARTA - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong pemerintah DIY memperkuat kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan sehingga mampu membangun kepercayaan wisatawan untuk datang.

"Kalau semua disiplin dan wisatawan mengenal bahwa Yogyakarta disiplin (protokol kesehatan) maka akan banyak wisatawan tertarik memilih Yogyakarta," kata Ketua DPD Asita DIY Hery Setyawan di Yogyakarta, Senin (12/10).

Dia menilai tingkat kepatuhan masyarakat Yogya-

karta menerapkan protokol kesehatan masih perlu ditingkatkan. Hal itu, menurut dia, sangat mempengaruhi persepsi dan minat wisatawan dari luar Yogyakarta untuk berkunjung.

Ia mengakui saat ini banyak segmen wisatawan baik korporasi atau keluarga yang memprioritaskan jaminan faktor keamanan dari penularan COVID-19.

"Kalau pelanggaran protokol kesehatan dibiarkan maka akan banyak yang takut ke Yogyakarta. Jadi dengan penegakan protokol yang tegas akan membuat orang-orang merasa aman di Yogyakarta," kata dia.

Menurut dia, bisnis pari-

wisata di DIY akan segera pulih apabila kedisiplinan protokol kesehatan betul-betul diterapkan. Dengan kepatuhan dan kepatuhan yang meningkat, otomatis penularan COVID-19 di DIY bisa terkendali.

Hery mengakui sampai saat ini sebagian besar pelaku usaha biro perjalanan wisata anggota Asita DIY masih belum mendapatkan pemesanan paket perjalanan wisata. "Kalau pun ada wisatawan domestik, sebagian besar mereka memilih menggunakan kendaraan mandiri dari pada jasa travel," kata dia.

Meski demikian, Dinas Pariwisata DIY justru

menyebut pariwisata di DIY sudah mulai menggeliat. Data kunjungan wisata yang terekam melalui aplikasi Visiting Jogja periode Agustus-September 2020 rata-rata 5.000-6.000 wisatawan per hari.

Sebagian besar wisatawan yang mengunjungi DIY masih didominasi wisatawan lokal di DIY, diikuti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan terakhir DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menyebutkan selama September 2020 pelanggaran protokol kesehatan di DIY terjadi di 234 tempat usaha, yang terdiri atas 133 restoran, 67 hotel, 12 tempat hiburan serta 31 tempat wisata. Berikutnya, sejak 1 sampai 4 Oktober 2020, pelanggaran terjadi di 27 tempat usaha. "Dari total jumlah tersebut, 34 (pelaku usaha) masuk pembinaan dan dipanggil ke Kantor Satpol PP DIY," kata dia.

Noviar berharap masih tingginya kasus penularan COVID-19 di DIY mampu menyadarkan masyarakat, khususnya pelaku usaha di berbagai sektor untuk memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. (ANTARA)

Pemkab Banyumas Pastikan Objek Wisata Laksanakan Protokol Kesehatan

PURWOKERTO - Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporbudpar) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memastikan setiap objek wisata telah melaksanakan protokol kesehatan sehingga kerumunan wisatawan dapat dihindarkan.

"Seluruh objek wisata yang sudah buka khususnya yang kami kelola telah menerapkan protokol kesehatan termasuk dengan menerapkan transaksi nontunai, sehingga kerumunan wisatawan dapat dihindarkan," kata Kepala Bidang Pariwisata Dinporbudpar Kabupaten Banyumas Wakhyono di Purwokerto, Banyumas, Senin (12/10).

Ia mengakui jika sebagian besar objek wisata di Kabupaten Banyumas khususnya yang dikelola Dinporbudpar rentan terjadi kerumunan terutama ketika turun hujan.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya sudah mengantisipasi dengan menyiapkan protokol kesehatan di setiap lokasi yang dijadikan tempat berteduh bagi wisatawan ketika terjadi hujan.

Dalam hal ini, lanjut dia, tempat-tempat untuk berteduh tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga wisatawan dapat saling menjaga jarak. "Apalagi, hingga

saat ini jumlah kunjungannya masih dibatasi, misalnya di Lokawisata Baturraden hanya 40 persen dari kapasitas normal, sehingga dengan luas area yang 16,85 hektare masing sangat longgar. Dengan demikian, untuk jadi kerumunan, saya kira masih dapat dikendalikan," katanya.

Ia meyakini dengan jumlah pengunjung yang dibatasi tidak akan terjadi kerumunan wisatawan di tempat berteduh ketika turun hujan.

Selain memasang papan peringatan dan penyampaian informasi melalui pengeras suara setiap 10 menit sekali, kata dia, Satgas COVID-19 internal juga selalu berkeliling untuk mengingatkan wisatawan agar senantiasa menjaga jarak, memakai masker, serta sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat-tempat yang telah disediakan.

Lebih lanjut, Wakhyono mengakui pihaknya sempat menyiapkan paket wisata virtual namun hal itu tidak berjalan lama seiring dengan telah dibuka objek wisata di Banyumas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Namun, setelah objek wisata dibuka, kami tidak melakukan itu (paket wisata virtual). Apalagi wisatawan lebih memilih untuk berkunjung secara langsung meskipun dengan pembatasan jumlah pengunjung," katanya. (ANTARA)

